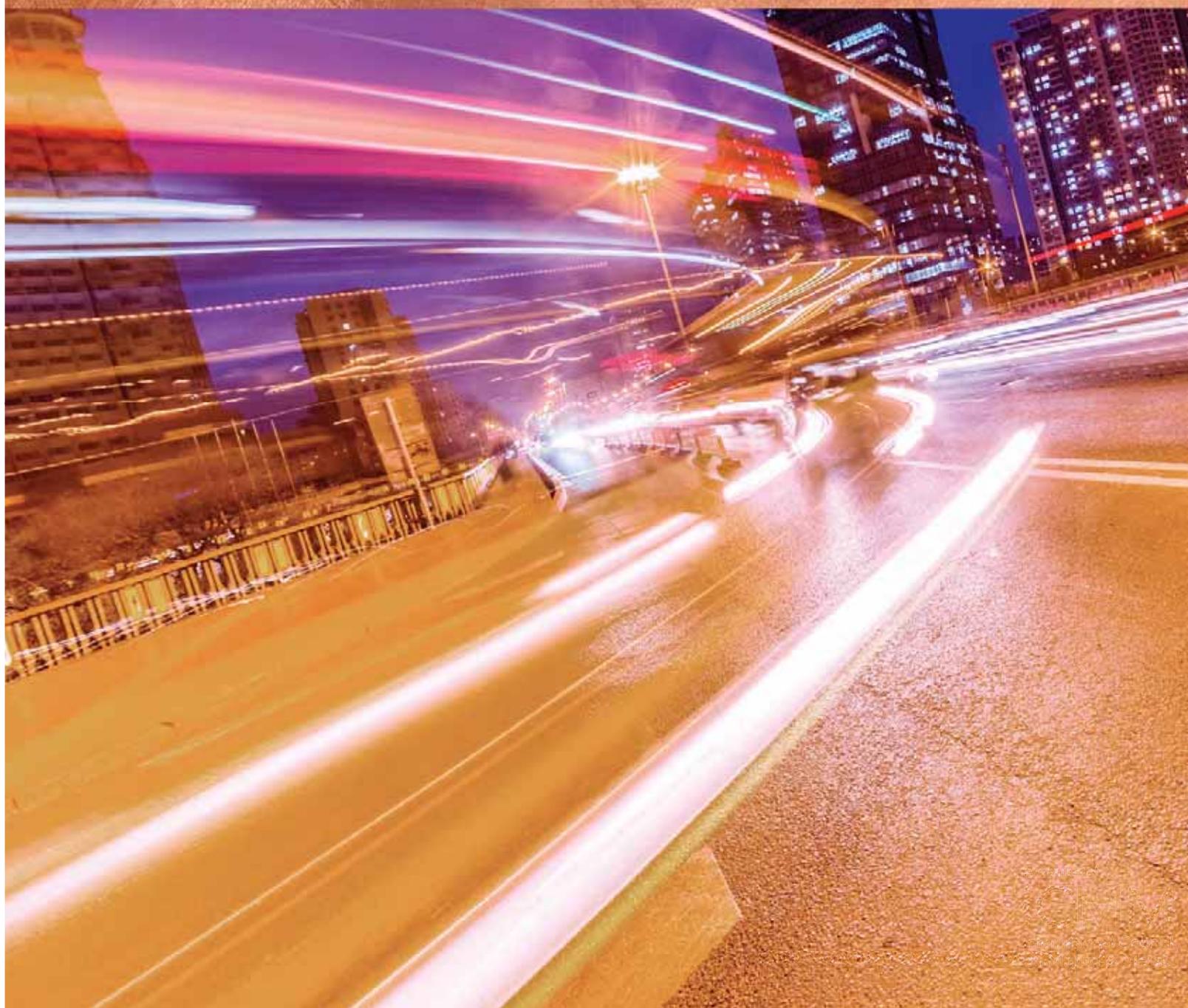


POWERED
BY COPPER



PT FREEPORT INDONESIA

LAPORAN INVESTASI SOSIAL PTFI TAHUN 2018



POWERED
BY COPPER



DAFTAR ISI

3	KATA PENGANTAR
4	RINGKASAN EKSEKUTIF
6	KESEHATAN
8	PENDIDIKAN
10	EKONOMI
14	INFRASTRUKTUR
16	HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA LOKAL
20	LEMBAGA-LEMBAGA LOKAL MITRA PTFI
22	BUDAYA
23	HAK ASASI MANUSIA
24	KANTOR PENGELOLAAN PROYEK
26	LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program investasi sosial PT Freeport Indonesia terus berjalan untuk memberikan manfaat terbaik dari kehadiran perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Komitmen yang terus dipegang oleh perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di sekitar area perusahaan diwujudkan dalam program-program di berbagai bidang: kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, infrastruktur, hubungan dengan masyarakat, dan hak asasi manusia Seiring dengan perubahan dinamika yang terjadi di perusahaan dan masyarakat, perusahaan semakin mengarahkan program-program investasi sosial menuju kemandirian masyarakat. PTFI melanjutkan berbagai usaha untuk merintis kemitraan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan sebagai bagian dari mencapai keberlanjutan.

Program Kesehatan. PTFI memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui klinik-klinik yang kami bangun di beberapa tempat di Kabupaten Mimika. Klinik-klinik tersebut memberikan pelayanan kesehatan sebanyak 46.900 kunjungan pasien pada tahun 2018. Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) juga terus memberikan pelayanan kesehatan sebanyak lebih dari 126.000 kunjungan pasien. Masyarakat mendapatkan berbagai layanan kesehatan yang diperlukan melalui fasilitas-fasilitas tersebut. Pada tahun 2018, RSMM juga mulai menyelaraskan pelayanan rumah sakit dengan program jaminan kesehatan dari pemerintah, termasuk dengan penambahan fasilitas yang diperlukan.

Berbagai program pengendalian penyakit terus berjalan sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pusat Pengendalian Malaria Timika merupakan salah satu bentuk kolaborasi perusahaan dengan pemangku kepentingan lain dalam usaha pengendalian malaria. Program ini melakukan berbagai program seperti penyemprotan pada lebih dari 39.000 rumah dan promosi kesehatan tentang malaria yang diikuti oleh lebih dari 74.000 orang. Pada tahun 2018, sebanyak 2.429 orang mengikuti pemeriksaan dan konseling

sukarela sebagai bagian dari program pengendalian HIV. Jumlah ini merupakan yang paling banyak dalam lima tahun terakhir.

Program Pendidikan. Program beasiswa yang telah berjalan sejak tahun 1996 terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas generasi muda Papua. Pada tahun 2018, sebanyak 591 siswa Papua (52 persen dari Suku Amungme, 24 persen dari Suku Kamoro, dan 24 persen dari suku-suku lain di Papua) menerima beasiswa melalui Dana Kemitraan yang dikelola oleh LPMK. Mereka menempuh pendidikan dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi di berbagai institusi pendidikan di Papua, Jawa, Sulawesi, dan luar negeri.

Asrama yang dibangun oleh LPMK dan dikelola oleh lembaga-lembaga mitra melanjutkan pendidikan dan pelayanan kepada 863 siswa. Kami juga mengelola Asrama Tomawin bagi 60 anak-anak Suku Amungme di Dataran Tinggi. Kami terus membangun kemitraan dengan pemerintah melalui pengiriman guru ke sekolah-sekolah di Dataran Tinggi. Kami mendidik generasi muda Papua sebagai tenaga kerja handal dalam bidang pertambangan melalui Institut Pertambangan Nemangkawi. Sejak awal program, lebih dari 4.000 siswa telah mengikuti program ini di mana lebih dari 2.900 siswa telah diterima sebagai tenaga kerja PTFI dan perusahaan kontraktor.

Program Ekonomi. Pengembangan potensi ekonomi di sekitar area tambang memberikan peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka secara. Program peternakan menciptakan lapangan kerja bagi 439 orang di mana 89 persen merupakan masyarakat asli Papua. Fasilitas peternakan ini juga menjadi pusat pelatihan peternakan bagi pelajar, peternak, dan institusi pemerintah di Mimika dan kabupaten lain di Papua. Program budidaya kakao juga melibatkan 320 petani lokal di mana 54 persen merupakan masyarakat asli Papua. Pada tahun 2018, program Usaha Mikro Kecil dan Menengah kami memberikan pendampingan usaha bagi 179

pengusaha binaan asal Papua di mana 68 persen diantaranya merupakan pengusaha asal Tujuh Suku asli Papua. Para pengusaha binaan tersebut menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 1.000 orang dan menghasilkan pendapatan lebih dari Rp. 199,5 miliar. Sejak awal program di tahun 2004, total dana bergulir yang telah disalurkan bagi pengusaha binaan sebesar Rp. 53,8 miliar.

Program Infrastruktur Bagi Masyarakat. Pada tahun 2018, kami menginvestasikan sekitar US\$ 2 juta untuk menyelesaikan komitmen dalam Proyek 3 Desa di dataran tinggi, termasuk: Lapangan Terbang Aroanop, Jembatan Banti dan Opitawak serta Jaringan Air Bersih. Kami juga menyelesaikan pembangunan micro hydro kapasitas 176 KW di Banti untuk menyediakan listrik bagi sekitar 500 orang di daerah tersebut. Pada tahun 2018, program-program infrastruktur di dataran tinggi tidak dapat berjalan sesuai rencana sebagai akibat dari gangguan keamanan. Di dataran rendah, kami juga telah menginvestasikan US\$ 7,9 juta dalam pembangunan fasilitas dan distribusi air bersih untuk kota Timika.

Program Hubungan dengan Masyarakat. Masyarakat di sekitar PTFI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perusahaan. Kami melakukan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat dalam program-program investasi sosial kami. Kami juga meneruskan langkah-langkah pengendalian pendulang tanpa ijin dan kegiatan lainnya untuk mengurangi risiko sosial dari kegiatan pertambangan. Pada tahun 2018, kami mengelola 76 keluhan dari masyarakat dimana 72 diantaranya berhasil diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sepuluh keluhan terkait hak ulayat dapat kami selesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Kami terus mendorong kerjasama dengan pemerintah dan lembaga lokal dalam penyelesaian keluhan hak ulayat. Kami melanjutkan kemitraan dengan lembaga a-lembaga lokal termasuk dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat

Amungme dan Kamoro (LPMK) yang mengelola Dana Kemitraan. Pada tahun 2018, kami berkontribusi sebesar US\$ 60,2 juta (58 persen dari total nilai Investasi Sosial). Sejak awal program pada tahun 1996, kami telah berkontribusi sebesar US\$ 798 juta dalam Dana Kemitraan untuk pengembangan masyarakat Papua.

Program Budaya. Kami bekerjasama dengan Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe untuk mengembangkan, melestarikan, dan mempromosikan seni dan budaya Suku Kamoro. Yayasan tersebut juga melakukan pendampingan kepada para pengukir serta pemasaran hasil ukiran dan anyaman. Sebanyak 210 ukiran Kamoro pilihan yang berasal dari 135 pengukir/penganyam dari 19 kampung di empat distrik berhasil terjual. Hasil penjualan tersebut seluruhnya dikembalikan kepada para pengukir.

Program Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2018, PTFI menerima 20 laporan dugaan pelanggaran HAM. Pada tahun 2018, sekitar 560 karyawan PTFI, 5.000 karyawan kontraktor, 2.000 masyarakat lokal, organisasi mitra, pelajar dan mahasiswa mendapatkan pelatihan HAM. Kantor HAM PTFI memberikan pelatihan HAM dan Prinsip Sukarela bagi 1.072 anggota polisi dan militer. PTFI juga mewajibkan semua karyawan baru untuk mengikuti pelatihan HAM. PTFI juga meluncurkan program Duta HAM dari perusahaan kontraktor untuk mempromosikan nilai-nilai HAM di lingkungan kerja.

Kemitraan menjadi salah satu cara kami dalam menjalankan program-program investasi sosial. Kami ingin memenuhi komitmen kami dalam pengembangan masyarakat sambil merintis kemitraan-kemitraan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kemitraan ini penting agar program-program yang telah kami lakukan dapat terus berkelanjutan dan mendorong kemandirian dalam masyarakat. Langkah-langkah strategis akan terus kami lakukan agar kehadiran kami memberi manfaat bagi masyarakat saat ini dan di masa mendatang.

KESEHATAN

Investasi sosial PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam bidang kesehatan menjadi salah satu kontribusi penting perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Kami terus meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya agar investasi sosial dalam bidang kesehatan yang telah kami rintis dan jalankan hingga saat ini dapat berkelanjutan dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kemitraan Dalam Pelayanan Fasilitas Kesehatan

PTFI membangun dan mengoperasikan beberapa fasilitas kesehatan yang meliputi klinik kesehatan di SP 9, SP 12, Pomako, Nayaro dan klinik khusus Tuberculosis (TB) dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Melalui Dana Kemitraan yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMMAK), kami juga membangun Rumah Sakit Mitra Masyarakat di dataran rendah dan Rumah Sakit Waa Banti di dataran tinggi. Fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat lokal terutama masyarakat dari Tujuh Suku asli Papua di sekitar wilayah kerja perusahaan.

Pada tahun 2018, klinik yang kami bangun melanjutkan berbagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan kemitraan juga menjadi salah satu prioritas kami dalam mencapai penguatan dan keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk kemitraan tersebut adalah merintis pengelolaan klinik di Pomako yang akan terintegrasi dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah. Kemitraan serupa telah berhasil kami rintis melalui klinik di Nayaro dan klinik TB dan IMS yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) yang melayani masyarakat di dataran rendah Kabupaten Mimika juga terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada tahun 2018, RSMM melakukan pengembangan beberapa sarana dan prasarana rumah sakit termasuk klinik pratama. Klinik pratama ini akan menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam program jaminan kesehatan (BPJS) dari Pemerintah. RSMM telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program ini sejak tahun 2017. Salah satu tantangan dari kontribusi RSMM dalam program BPJS ini adalah isu kartu kependudukan yang menyebabkan masyarakat belum memiliki keanggotaan BPJS. PTFI dan LPMMAK terus bekerjasama dengan pemerintah agar masyarakat mendapatkan manfaat terbaik dari program BPJS melalui RSMM.



Fasilitas pelayanan kesehatan berupa ruang operasi di Rumah Sakit Mitra Masyarakat, Timika. Memberikan pelayanan gratis bagi masyarakat lokal dari tujuh suku.

Pelayanan Rumah Sakit

126.823 kunjungan

Pelayanan pasien di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM)

- ⊖ 93.645 Pasien (Subsidi LPMMAK)
- ⊖ 33.178 Pasien (Non Subsidi LPMMAK)

46.900 kunjungan

Klinik kesehatan yang dikelola PT Freeport Indonesia memberikan layanan kesehatan sebanyak pasien.

74% Biaya kunjungan merupakan subsidi dari LPMMAK.



Pengendalian Malaria

6.600 (kasus)

Jumlah insiden malaria yang terdeteksi

13.510 (slide)

Jumlah slide yang di periksa di Puskesmas Timika

39.545 (rumah)

Penyemprotan Residu Nyamuk

74.951 (orang)

Promosi Kesehatan Tentang Malaria

3.238 (kelambu)

Pembagian kelambu Anti Nyamuk



Puskesmas Timika merupakan salah satu mitra dalam program pengendalian malaria oleh PT Freeport Indonesia

13.510 Jumlah slide yang diperiksa di Puskesmas Timika
4.953 Jumlah slide positive malaria:
Rasio kasus malaria terhadap slide yang diperiksa menurun 5% dari tahun 2017

Pengendalian HIV/AIDS

5.882 (Kunjungan)

Klinik Infeksi Menular Seksual memberikan layanan kepada pasien

27 (kasus)

Kasus Baru HIV yang terdeteksi tahun 2018

2.459 (orang)

Program Voluntary Counseling and Testing diikuti oleh

46.867 (orang)

Promosi kesehatan tentang HIV/AIDS ditahun 2018



Pengendalian Tuberculosis (TB)

6.379 (kunjungan)

Klinik Tuberculosis memberikan layanan kunjungan pasien



Kemitraan Dalam Pengendalian Malaria

PTFI meneruskan komitmennya dalam kontribusi pengendalian malaria di Kabupaten Mimika. Berbagai langkah kemitraan telah dilakukan oleh PTFI untuk mencapai hasil terbaik dari program pengendalian malaria ini. PTFI bersama para pemangku kepentingan melaksanakan berbagai program pengendalian malaria

melalui Pusat Pengendalian Malaria Timika. Fasilitas ini melakukan berbagai kegiatan yang meliputi konseling dan penyuluhan malaria, penyemprotan, pembagian kelambu, kegiatan pembersihan sanitasi lingkungan, pendeteksian kasus malaria dan promosi anti malaria.



Penyemprotan menjadi salah satu program rutin dari Pusat Pengendalian Malaria Timika yang cukup efektif mengendalikan penyakit malaria di Timika

Kemitraan Dalam Pelayanan Kesehatan Bergerak

Masyarakat di daerah pesisir Kabupaten Mimika memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pelayanan kesehatan. Klinik bergerak menjadi salah satu kontribusi kepada masyarakat agar mereka mendapatkan kesehatan yang layak. Program yang dijalankan oleh LPMMAK bersama pemerintah daerah dan mitra lainnya ini menyediakan pelayanan kesehatan umum dan spesialis, vaksinasi dan imunisasi, kesehatan ibu dan anak serta penyuluhan kesehatan. Pada tahun 2018, klinik bergerak memberikan layanan kesehatan bagi lebih dari 3.645 orang di wilayah pesisir di empat distrik Kabupaten Mimika.

PENDIDIKAN

Ketersediaan sumber daya manusia yang handal menjadi salah satu prioritas pembangunan di Papua. Pemerintah Papua menempatkan pendidikan sebagai salah satu isu strategis kewilayahan Papua dengan fokus pada pemerataan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMMAK) terus melanjutkan investasi dalam bidang pendidikan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. Beberapa program pendidikan yang ditawarkan sebagai program investasi sosial perusahaan meliputi program beasiswa, asrama dan pendidikan kejuruan.

Beasiswa

Program Beasiswa telah menjadi salah satu program yang memberi manfaat besar bagi masyarakat asli Papua disekitar wilayah perusahaan. Pada akhir tahun 2018, tercatat sebanyak 591 siswa mendapatkan beasiswa dari LPMMAK. Mereka berasal dari Suku Amungme (54 persen), Suku Kamoro (24 persen), dan

beberapa suku-suku lain di Papua (22 persen). Pada tahun ini, LPMMAK memberikan beasiswa baru bagi 364 anak-anak Papua yang lolos proses seleksi. Para siswa tersebut menempuh pendidikan dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi di Papua, Jawa, Sulawesi dan luar negeri. Beasiswa untuk tingkat perguruan tinggi diprioritaskan bagi anak-anak Papua yang menempuh pendidikan di bidang ilmu alam, teknologi, teknik, dan matematika). Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara rutin bersama dengan mitra untuk memastikan bahwa para siswa mereka mendapatkan manfaat terbaik dari program beasiswa.

Asrama Pendidikan

Program asrama telah menjadi program unggulan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, khususnya bagi mereka yang berasal dari daerah terpencil di Kabupaten Mimika. Melalui Dana Kemitraan, LPMMAK membangun dan mengelola lima asrama bagi siswa asal Papua. Empat asrama beroperasi di wilayah Kabupaten Mimika dan satu asrama berada di Semarang, Jawa Tengah. Kelima asrama tersebut memberi manfaat bagi 863 siswa pada akhir tahun 2018. PTFI juga mengelola sebuah asrama di dataran

Program Pendidikan Beasiswa LPMMAK

Pada tahun 2018, program beasiswa diberikan kepada 591 siswa yang terdiri dari 318 (54 persen) Suku Amungme, 144 (24 persen) Suku Kamoro dan 129 (22 persen) dari suku-suku lain di Papua.

Beasiswa Berdasarkan Suku

54%
Suku Amungme
318 (Siswa)

24%
Suku Kamoro
144 (Siswa)

20%
5 Suku kekerabatan
114 (Siswa)

2%
Suku lainnya
15 (Siswa)

Beasiswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan





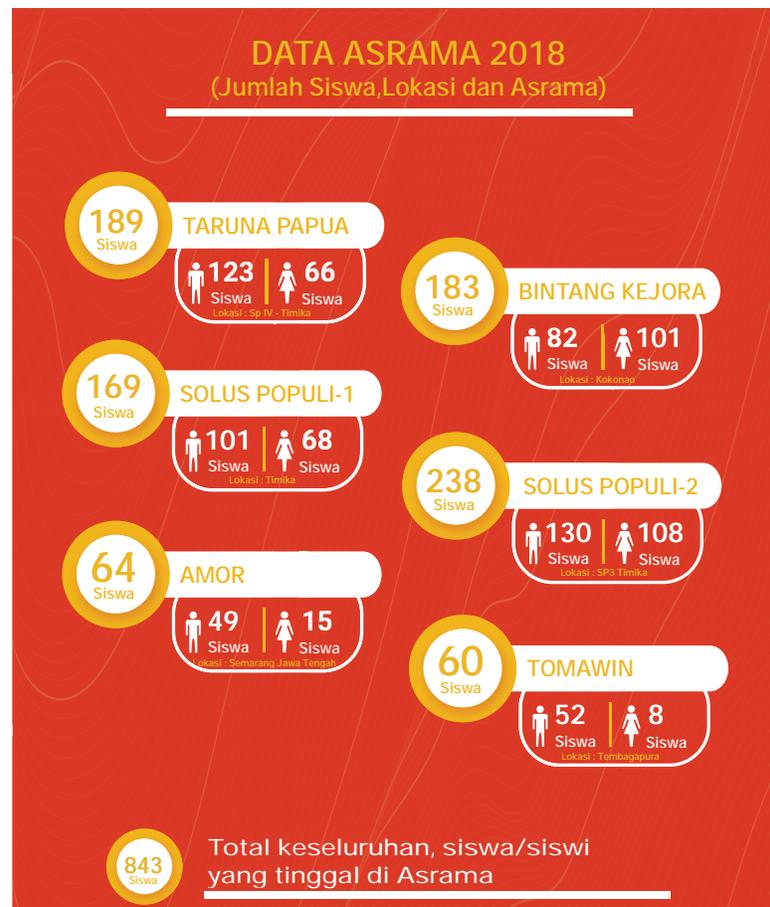
Sekolah dan Asrama Taruna Papua dapat menampung 1.000 siswa dan menjadi salah satu kompleks pendidikan terbesar di Kabupaten Mimika. LPMMAK dan pengelola sekolah terus melakukan langkah-langkah agar semakin banyak generasi muda Papua mendapatkan pendidikan di sekolah ini.

tinggi Tembapapura yang bernama Asrama Tomawin. Asrama Tomawin merupakan asrama yang didirikan PTFI bagi siswa asal Suku Amungme yang berada di dataran tinggi. Pada tahun 2018, Asrama Tomawin menampung 60 siswa asal Suku Amungme untuk menempuh pendidikan. Para siswa di asrama-asrama tersebut tidak hanya mendapatkan fasilitas yang diperlukan dalam pendidikan formal namun juga pengembangan karakter, seni dan budaya, kemandirian dan ketrampilan dasar lainnya.

Institut Pertambangan Nemangkawi

Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) merupakan sebuah lembaga pendidikan yang didirikan PTFI untuk melatih generasi muda Papua memasuki dunia kerja khususnya dalam bidang pertambangan. Sejak didirikan tahun 2003, institusi ini telah melatih lebih dari 4.000 siswa dalam program Apprentice dan Diploma Administrasi Bisnis. Hingga tahun 2018, sebanyak 2.982 siswa telah diterima sebagai tenaga kerja PTFI atau perusahaan kontraktor. Pada tahun 2018, sebanyak 86 siswa masih menempuh pendidikan di IPN. IPN juga menyelenggarakan Program Pendidikan Orang Dewasa dan Papuan Bridge Program. Program Pendidikan Orang Dewasa dirancang untuk

meningkatkan keterampilan masyarakat Amungme dan Kamoro sedangkan Papuan Bridge Program merupakan program pengembangan bagi siswa Papua terpilih atau yang telah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja.



EKONOMI

PT Freeport Indonesia (PTFI) diakui telah menjadi salah satu penggerak ekonomi di sekitar wilayah operasinya. Kehadiran PTFI mendorong munculnya berbagai kegiatan ekonomi di Kabupaten Mimika. Melalui program investasi sosial perusahaan dalam bidang ekonomi, kami terus melakukan identifikasi dan pengembangan peluang kegiatan ekonomi berbasis kearifan dan potensi lokal. Beberapa peluang ekonomi yang kami kembangkan dalam program investasi sosial bidang ekonomi antara lain program peternakan, perikanan, perkebunan dan usaha mikro kecil dan menengah.

Peternakan

Program peternakan yang kami lakukan menyediakan kebutuhan daging ayam dan telur di Kota Timika dan sekitarnya. Kebijakan pemerintah daerah yang membatasi produk daging ayam dan telur dari luar Papua menjadikan produk dari program peternakan yang kami lakukan ini seluruhnya terserap oleh pasar lokal. Bersama dengan Yayasan Jayasakti Mandiri (YJM) sebagai mitra dalam program ini, kami melakukan koordinasi rutin dengan Dinas Peternakan dan Himpunan Peternak Unggas Kabupaten Mimika untuk memastikan kebutuhan ayam dan telur di Kabupaten Mimika terpenuhi dan harga dipasar dapat terjaga.



Identifikasi potensi ekonomi baru, seperti perkebunan kakao, dalam program investasi sosial membuka alternatif kegiatan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Program peternakan ini menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat lokal. Sebagai salah satu program ekonomi unggulan, program ini memberdayakan 439 orang sebagai peternak dan karyawan dimana sebanyak 89 persen merupakan

Program Ekonomi Peternakan SP 12 - YJM

PENJUALAN 2018

37.3 M

Omset penjualan yang di bukukan pada tahun 2018.
(Meningkat 7.2% dari tahun 2017)



TENAGA KERJA

439

Orang terserap sebagai tenaga kerja di peternakan



PEKERJA LOKAL

89%

di antaranya adalah Masyarakat asli Papua



Program Ekonomi

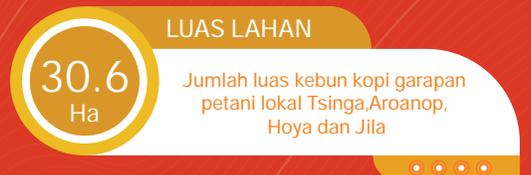
Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat

Perkebunan Kakao SP12



**Jumlah luas lahan kakao 210 hektar tersebar di berbagai lokasi di Timika*

Koperasi Amungme Gold



masyarakat asli Papua. Melalui program ini, peternak lokal dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang peternakan.

PTFI melihat adanya potensi yang besar untuk pengembangan peternakan ayam di Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, peternakan yang berada di SP 9 dan SP 12 di dataran rendah ini juga menjadi salah satu pusat pelatihan peternakan bagi para pelajar, masyarakat, dan pegawai pemerintah di Kabupaten Mimika maupun kabupaten lainnya di Papua. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang peternakan, program ini terus berkembang dan berkelanjutan. PTFI juga terus mencari mitra dalam program peternakan agar program ini dapat semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan.

Selain program Dalam program peternakan ayam, LPMK mendampingi XX kelompok usaha peternakan ayam petelur dalam mengembangkan usaha mereka. LPMK juga melanjutkan peternakan sapi di Agimuga

dengan memberdayakan masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat setempat membudidayakan XX sapi didampingi Universitas Negeri Papua dan Dinas Peternakan Kabupaten Mimika. Kemitraan dan transfer pengetahuan yang semakin baik diharapkan dapat mendorong tercapainya kemandirian masyarakat.

Pertanian

Topografi Kabupaten Mimika yang membentang dari dataran tinggi hingga dataran rendah mendorong PTFI untuk melakukan identifikasi potensi pertanian yang sesuai dengan wilayah masing-masing. Di dataran tinggi, PTFI mendampingi masyarakat dalam pengembangan potensi perkebunan kopi dan sayuran. Budidaya kopi ini dikembangkan di beberapa kebun di Distrik Tembagapura dan Hoya. Program ini melibatkan 42 petani asli Papua yang mengelola 27 hektar lahan pada tahun 2018. Hasil budidaya kopi jenis arabika ini dipasarkan sebagai produk yang dikenal dengan nama merek Kopi Amungme Gold. Sebagai bagian dari usaha



Identifikasi potensi ekonomi baru, seperti perkebunan kakao, dalam program investasi sosial membuka alternatif kegiatan ekonomi bagi masyarakat lokal.

merintis keberlanjutan program budidaya kopi ini, PTFI memfasilitasi pembentukan Koperasi Amungme Gold pada tahun 2013. Hingga saat ini, berbagai usaha peningkatan kapasitas anggota dan pengurus koperasi terus dilakukan, tidak terbatas pada peningkatan kapasitas petani namun juga kemampuan manajemen para pengurus yang sebagian besar masyarakat asli Papua.

Di dataran rendah, kami mendukung budidaya kakao di lebih dari lima belas desa sasaran. Pada tahun 2018, PTFI bermitra dengan koperasi lokal untuk mendistribusikan bibit kakao dan memberikan pelatihan kepada petani kakao. Per Desember 2018, 320 petani (54 persen petani asli Papua) terlibat dalam program pertanian kakao ini.

Perikanan

PTFI bekerjasama dengan Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL) Keuskupan Timika dalam mendampingi

masyarakat dalam pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan air tawar. Dalam program perikanan tangkap ini, para nelayan mendapatkan bantuan untuk penyimpanan hasil tangkapan melalui empat pos pengumpulan ikan di wilayah pesisir dan fasilitas pabrik es mini. Mereka juga dibantu dalam memasarkan hasil tangkapan mereka melalui koperasi. Para nelayan tradisional itu juga terus dikembangkan kemampuannya melalui berbagai pelatihan seperti perbaikan motor tempel, perbaikan jaring ikan, dan pembuatan perahu fiber.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Dana Bergulir

Program usaha kecil mikro dan menengah mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan pengusaha lokal dalam penyediaan barang dan jasa, meningkatkan daya saing para pengusaha binaan, dan meningkatkan penggunaan barang dan jasa lokal bagi operasi kami. Program ini memberikan pendampingan bagi pengusaha Papua yang potensial. Pada tahun 2018, program UMKM memberikan pendampingan bagi 179 pengusaha asli Papua. Program ini menciptakan kesempatan kerja bagi sekitar 1.000 orang Kota Timika di mana 62 persen merupakan tenaga



Pada tahun 2017, program UMKM menghasilkan empat pengusaha Papua dalam bidang ritel modern, termasuk usaha pom bensin mini.

Program Ekonomi Usaha Mikro Kecil & Menengah



199.5 (Milyar)

Omset pendapatan perusahaan binaan yang di bukukan pada tahun 2018.

(Meningkat 21% dari tahun 2017)



1041 (Pekerja)

Penyerapan tenaga kerja 63% diantaranya tenaga kerja asli Papua

(Meningkat 11% dari tahun 2017)



179 (Pengusaha)

Pengusaha binaan aktif pengusaha Papua binaan UMKM PT Freeport Indonesia 68% di antaranya adalah masyarakat asli 7 suku Papua



1.6 (Milyar)

Pengucuran dana bergulir bagi 62 pengusaha binaan PT Freeport Indonesia

3.4M (Milyar) Total pengembalian pinjaman sebesar (termasuk pinjaman dari tahun-tahun sebelumnya)

kerja asli Papua. Pendapatan para pengusaha tersebut mencapai Rp. 199,5 miliar.

PTFI melanjutkan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk meningkatkan aksesibilitas wirausahawan Papua untuk mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan. Melalui kerjasama ini, BRI menjadi penyalur dana bergulir dengan jaminan dari PTFI. Kerjasama ini memberikan alternatif lain bagi para pengusaha selain mendapatkan bantuan modal dari Yayasan Bina Utama Mandiri (YBUM) serta meningkatkan profesionalitas pengusaha binaan dari sisi permodalan. Pada tahun 2018, dana bergulir yang disalurkan sebesar Rp. 1,6 miliar bagi 62 pengusaha binaan lokal. Sejak awal program di tahun 2004, total dana bergulir yang telah disalurkan bagi pengusaha binaan mencapai Rp. 53,8 miliar. Kami mendorong para pengusaha agar lebih banyak mendapatkan mitra dan konsumen dari luar PTFI untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan usaha mereka.

Program dana bergulir LPMK juga menyediakan fasilitas pengembangan usaha bagi lebih dari 700

pengusaha mikro asal Tujuh Suku asli Papua. Para pengusaha binaan tersebut bergerak di bidang jasa, kios/ritel, dan berbagai industri rumahan. Program ini menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat sehingga mereka dapat membiayai pendidikan dan perawatan kesehatan serta mengembangkan usaha mereka.



Peluncuran program budidaya kepiting bakau menggunakan sistem 'crab ball' disaksikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, ibu Susi Pudjiastuti.

INFRASTRUKTUR

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat dan mendukung pembangunan di Kabupaten Mimika. Kami bekerjasama dengan berbagai mitra dalam investasi infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Pembangunan infrastruktur ini kami lakukan di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah sekitar area operasi kami.

Program Tiga Desa merupakan program infrastruktur bagi masyarakat di Banti, Tsinga dan Aroanop di dataran tinggi. Sejak dimulainya program ini pada tahun 2000, kami telah menginvestasikan lebih dari US\$ 91 juta. Melalui proyek ini, kami menyediakan dana, peralatan, bahan, transportasi dan tenaga kerja untuk membangun jaringan infrastruktur yang mencakup lebih dari 300 rumah, 400 tangki septik, 3 sekolah, 10 rumah guru, 3 klinik, 3 pasar, 13 gereja, 20 jembatan, generator 225KW, dan 2 lapangan terbang. Investasi dalam infrastruktur masyarakat telah memberi manfaat bagi sekitar 1.000 orang Papua yang tinggal di daerah dataran tinggi terpencil ini.

Pada tahun 2018, kami menginvestasikan sekitar US\$ 2 juta untuk menyelesaikan komitmen dalam Proyek 3 Desa, termasuk: Lapangan Terbang Aroanop, fasilitas micro hydro Banti 176 KW, jembatan Banti dan Opitawak serta jaringan air bersih. Pada tahun 2018, kami melakukan uji coba terbang dan pendaratan di Lapangan Terbang Aroanop bersama Pemerintah Kabupaten Mimika. Lapangan terbang ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2018 sesuai perijinan dari pemerintah. Lapangan terbang Aroanop merupakan lapangan terbang perintis kedua yang dibangun oleh PTFI untuk meningkatkan akses masyarakat di wilayah tersebut, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2018, kami juga menyelesaikan pembangunan micro hydro kapasitas 176 KW di Banti. Proyek ini menyediakan listrik bagi masyarakat di daerah tersebut. Kami terus menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk melakukan survei dan mengembangkan rencana penyerahan dan pemeliharaan lanjutan aset-aset yang dibangun ini.

PTFI menandatangani kesepakatan dengan pemerintah daerah pada tahun 2013 untuk membangun fasilitas olahraga kelas dunia yang secara khusus mendukung provinsi Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Proyek

Program Infrastruktur

DATARAN RENDAH

Membangun fasilitas olahraga kelas dunia yang secara khusus mendukung provinsi Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.

Komplek Olahraga di Timika senilai

US\$ 33 JUTA

Beberapa fasilitas dalam kompleks ini antara lain stadion terbuka dengan kapasitas tempat duduk 3.500; stadion tertutup untuk bulu tangkis, bola voli dan bola basket dengan kapasitas tempat duduk 5.500; lapangan atletik, dua asrama atlet dan berbagai fasilitas pendukung.

Fasilitas Pengolahan Air minum untuk Timika

US\$ 6,4 JUTA

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan dan memperluas jaringan pemipaan kota secara bertahap untuk menghubungkan masyarakat Timika ke air minum dari fasilitas ini.

PTFI juga meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat suku Kamoro di Lima Desa di dataran rendah. Instalasi air bersih yang telah dibangun sejak awal tahun 2000 ini terus dipelihara, ditambah dan ditingkatkan kualitasnya.



DATARAN TINGGI

Kami membantu infrastruktur dasar untuk mendukung kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi kami.

INVESTASI

Sejak Tahun 2000

**US\$ 89,1
JUTA**

Melalui proyek ini, kami menyediakan dana, peralatan, bahan, transportasi dan tenaga kerja untuk membangun jaringan infrastruktur yang mencakup lebih dari 300 rumah, 400 tangki septik, 3 sekolah, 10 rumah guru, 3 klinik, 3 pasar, 13 gereja, 20 jembatan, generator

di Tahun 2017

**US\$ 7,9
JUTA**

Pada tahun 2017, kami menginvestasikan sekitar US\$ 7,9 juta untuk menyelesaikan komitmen dalam Proyek 3 Desa, termasuk: Lapangan Terbang Aroanop, fasilitas micro hydro Banti 176 KW, jembatan Banti dan Opitawak serta



senilai US\$ 33 juta ini telah selesai dibangun pada tahun 2017. Beberapa fasilitas dalam kompleks ini antara lain stadion terbuka dengan kapasitas tempat duduk 3.500; stadion tertutup untuk bulu tangkis, bola voli dan bola basket dengan kapasitas tempat duduk 5.500; lapangan atletik, dua asrama atlet dan berbagai fasilitas pendukung. PTFI mensubkontrakkan pekerjaan konstruksi ke kontraktor lokal yang menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 300 orang, dimana lebih dari 100 orang merupakan orang asli Papua. Meskipun proyek ini telah selesai dibangun, PTFI melanjutkan pengelolaan fasilitas ini selama satu tahun dan di saat yang sama bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menunjuk pihak ketiga profesional dalam mengelola fasilitas olahraga.

Pada tahun 2013, PTFI bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperbaiki distribusi air bersih ke Kota Timika, daerah perkotaan yang berkembang dan berdekatan dengan wilayah operasi kami. Kami mensponsori studi kelayakan dan studi dampak lingkungan untuk menentukan desain terbaik fasilitas pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan Timika yang semakin meningkat. Sebagai hasil dari studi, kami telah menyumbangkan keahlian teknik dan investasi senilai US\$ 6,4 juta (dari total komitmen US\$10

juta) untuk membangun fasilitas tersebut. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan dan memperluas jaringan pemipaan kota secara bertahap untuk menghubungkan masyarakat Timika ke air minum dari fasilitas ini.

Pada 2018, PTFI menyelesaikan pembangunan dua instalasi pengolahan air, satu penampungan air, enam dari tujuh sumur bor, dan gedung perkantoran pendukung. Pembangunan tahap II pemipaan dan distribusi air masih berjalan. Untuk membangun fasilitas ini, PTFI bermitra dengan kontraktor lokal yang menyediakan pekerjaan kepada lebih dari 70 orang dimana 20 di antaranya adalah orang asli Papua. Fasilitas ini ditargetkan selesai dan diresmikan pada tahun 2019.

PTFI juga meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat suku Kamoro di Lima Desa di dataran rendah. Instalasi air bersih yang telah dibangun sejak awal tahun 2000 ini terus dipelihara, ditambah dan ditingkatkan kualitasnya. Masyarakat setempat juga dilibatkan dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih sebagai bagian untuk mencapai keberlanjutan program air bersih.

HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA LOKAL

PT Freeport Indonesia menyadari pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja kami. Hubungan baik ini diperlukan tidak hanya untuk mendapatkan dukungan sosial bagi operasi kami tapi juga agar kami dapat memberikan manfaat terbaik dari kehadiran kami bagi masyarakat. Setiap keputusan dalam operasi kami akan memberi dampak bagi masyarakat sekitar. Kami berkomitmen untuk terus memaksimalkan dampak yang positif bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami juga terus berusaha mengurangi dampak negatif dan risiko dari operasi kami terhadap masyarakat sekitar. Beberapa langkah yang kami lakukan pada tahun 2018 untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat antara lain mitigasi dampak pengelolaan tailing, pengelolaan pendulangan tanpa ijin, pengelolaan keluhan masyarakat, dan pendampingan dan pengembangan kapasitas lembaga lokal.

Mitigasi Dampak Pengelolaan Tailing

Pasir sisa tambang atau *tailing* yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan PTFI dialirkan ke



Layanan transportasi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan dilakukan dalam kerjasama dengan Keuskupan Timika.

sebuah sistem sungai aliran tailing yang dinamakan *Mofidied Ajkwa Deposition Area (ModADA)*. Kami selalu memastikan agar tailing tersebut tetap berada di dalam area pengendapan sesuai dengan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pengelolaan *tailing* tersebut berdampak pada salah satu jalur transportasi tradisional masyarakat setempat di sekitar Sungai Minajerwi. Pengelolaan *tailing* ini juga berdampak pada terhambatnya kegiatan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pengelolaan *tailing*. Menyadari dampak dari pengelolaan tailing ini, kami telah berkonsultasi dengan masyarakat dan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak bagi masyarakat. Pada tahun 2018, kami melanjutkan berbagai langkah mitigasi dampak sosial pengelolaan tailing. Langkah-langkah mitigasi ini lebih terintegrasi dan terkoordinasi melalui Gugus Tugas Mitigasi Dampak Sedimentasi yang terdiri dari berbagai departemen di PTFI.

Untuk mengurangi dampak pada jalur transportasi tradisional masyarakat, kami bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menyediakan transportasi laut bagi masyarakat terdampak. Dalam program transportasi ini, PTFI menyediakan kapal bagi masyarakat di kampung-kampung pesisir yang terdampak. Layanan kapal disediakan bagi masyarakat



Penyerahan sertifikat teknis petugas listrik kampung di Desa Otakwa pada Pelatihan Listrik masuk oleh Kadistrik Mimika Timur Jauh dan Pihak PT Freeport Indonesia.

di Manasari dan Otakwa di pesisir barat Kabupaten Mimika menuju pelabuhan Pomako. Pelabuhan ini merupakan salah satu akses jalan umum menuju Kota Timika sebagai pusat kegiatan ekonomi. Selain transportasi laut, kami membantu aksesibilitas masyarakat di Lima Desa Kamoro yang terdampak dengan menyediakan bis. Layanan ini membantu mendukung masyarakat dalam kegiatan ekonomi mereka seperti memasarkan hasil kebun dan ikan mereka ke Kota Timika.

Mitigasi dampak sosial pengelolaan *tailing* ini juga kami lakukan melalui program penguatan ekonomi bagi masyarakat Suku Kamoro yang terdampak. Pada tahun 2018, kami melanjutkan program ekonomi berbasis desa dan sejalan dengan pilar mata pencaharian masyarakat Suku Kamoro: sagu, sungai, dan sampan. Bersama dengan aparat desa dan pemerintah daerah, kami merintis langkah-langkah untuk merevitalisasi desa-desa Kamoro menjadi pusat ekonomi masyarakat melalui pengembangan kios-kios kampung, budidaya sagu perkebunan lainnya. Program perikanan juga terus dikembangkan dengan pengoperasian pos pengumpulan ikan di wilayah pesisir dan fasilitas pabrik es mini. Fasilitas ini membantu nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan ikan mereka. Pada tahun 2018, kami mulai

merintis kolaborasi dengan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dari Kementerian Kelautan (KKP) dan Perikanan dalam mengembangkan Otakwa, salah satu desa di pesisir, menjadi pusat ekonomi di bagian timur Kabupaten Mimika. Langkah ini diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi di Kota Timika. Koordinasi dengan KKP terus dilakukan dan SKPT di Otakwa diharapkan mulai berjalan pada tahun 2020.

Pada tahun 2018, kami juga melakukan berbagai kegiatan penguatan kapasitas masyarakat di di sekitar area terdampak. Kami memberikan pelatihan perbaikan motor tempel, pembuatan dan perawatan kapal fiber tradisional, serta pembuatan dan perbaikan jaring ikan. Pelatihan-pelatihan tersebut kami lakukan untuk mendukung program perikanan yang dilakukan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Mimika. Kami juga memberikan pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan untuk berkebun dan pelatihan budidaya perikanan kolam. Pelatihan-pelatihan tersebut diikuti oleh sekitar 300 orang di mana sebagian besar merupakan pemuda-pemuda Kamoro. Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengurangi dampak yang tidak diinginkan dari pengelolaan *tailing* dari kegiatan pertambangan kami. Di saat yang sama, kami ingin membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pengelolaan *tailing*.

Pengelolaan Pendulangan Tanpa Ijin

PTFI menggunakan area pengendapan yang telah disetujui di daerah dataran rendah dan pesisir untuk mengelola *tailing* dari kegiatan penambangan. Aliran sungai *tailing* ini menjadi area yang digunakan masyarakat untuk kegiatan pendulangan tanpa ijin. Kegiatan pendulangan ini menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, serta memiliki risiko kesehatan dan keselamatan para pendulang sendiri. Kami menyadari bahwa tidak ada solusi cepat untuk mengatasi



Kunjungan TIM LPMK & Tokoh Masyarakat ke Grasberg dan Underground, melihat operasi Tambang PTFI terupdate

berbagai isu dari kegiatan pendulangan tanpa ijin ini. Namun, kami percaya bahwa dengan berbagai pendekatan seperti manajemen risiko keamanan, kerja sama dengan pemerintah, keterlibatan pemangku kepentingan dan pengembangan sosial ekonomi untuk mata pencaharian alternatif dapat mengurangi risiko dari kegiatan pendulangan ini.

Insiden keamanan yang mulai terjadi di tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2018 berdampak pada berkurangnya kegiatan pendulangan tanpa ijin di dalam wilayah perusahaan, terutama di dataran tinggi. Para pendulang di dataran tinggi menghentikan kegiatan pendulangan mereka dan kembali ke Kota Timika di dataran rendah. Meskipun tidak ada insiden keamanan sejak pertengahan tahun 2018, pendulangan di dataran tinggi terus dibatasi. Sebagai akibatnya, kegiatan pendulangan tanpa ijin di dataran rendah mengalami peningkatan.

Kami melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko dari kegiatan pendulangan ini pada tahun 2018. Pemantauan pendulang dan sosialisasi keselamatan menjadi kegiatan rutin untuk mengurangi risiko bagi pendulang dan karyawan. Kami juga memberdayakan 30 mantan pendulang untuk bekerja

sebagai penjaga keamanan di jalan sekitar sungai aliran tailing. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada para pendulang tentang keselamatan dan keamanan di sekitar kegiatan pendulangan dan mengidentifikasi daerah lain untuk menambang dengan selamat. Koordinasi ini juga membantu mengatasi potensi konflik yang terkait dengan pemukiman ilegal dari para pendulang.

Pada tahun 2018, kami terlibat dalam seminar tentang penambangan rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Seminar ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari perusahaan-perusahaan tambang tentang tantangan pengendalian penambangan rakyat dan penambangan tanpa ijin. Kami juga mengikuti diskusi kelompok terpumpun (*focused group discussion*) yang dipimpin oleh Kepolisian Mimika untuk membahas opsi untuk mengurangi kriminalitas terkait pendulangan serta opsi untuk legalisasi. Diskusi ini melibatkan pendulang, pemilik toko emas, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Meskipun belum ada solusi efektif terkait pengelolaan pendulang tanpa ijin, kami terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik bagi perusahaan dan masyarakat pendulang.



Pelatihan membuat makanan sehat dari bahan-bahan lokal bagi ibu-ibu Suku Kamoro sebagai bagian dari pemanfaatan potensi lokal dalam kegiatan rumah tangga.



Kegiatan survei lapangan dalam pengumpulan data dan informasi mengenai penilaian kebutuhan masyarakat di kampung pesisir.

Penanganan Keluhan Masyarakat

PTFI menerima dan menangani keluhan masyarakat melalui Sistem Manajemen Keluhan Masyarakat. Pada tahun 2018, PTFI mengelola 76 keluhan dari masyarakat dimana 72 diantaranya berhasil diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Keluhan tersebut terkait tuntutan kompensasi hak ulayat, lingkungan, dan kompensasi jasa.

Pada tahun 2018, kami mengelola sepuluh tuntutan terkait hak ulayat. Meskipun tuntutan hak ulayat bukan merupakan tuntutan tertinggi, kami memberi perhatian khusus terhadap isu hak ulayat. Kami terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika untuk menyelidiki klaim terkait hak ulayat dan bekerja dengan semua pihak untuk mencoba mencapai kesepakatan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Kami juga melanjutkan sosialisasi hak komunal dan hukum positif terkait hak ulayat bersama BPN Kabupaten Mimika agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai hak ulayat. Gugus tugas hak ulayat yang terdiri dari lintas departemen di PTFI dibentuk sebagai bagian dari mitigasi isu hak ulayat. Gugus tugas ini melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam mitigasi tuntutan hak ulayat. Melalui langkah-langkah ini, seluruh tuntutan hak ulayat bisa

diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. PTFI berkomitmen untuk mengelola keluhan dari masyarakat sesuai dengan prosedur dan menghasilkan solusi terbaik bagi perusahaan dan masyarakat.

Pendampingan dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Lokal

Dalam melaksanakan komitmen sosial perusahaan, PT. Freeport Indonesia (PTFI) perlu mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga lokal agar program dapat berjalan selalu memperhatikan nilai-nilai setempat. Beberapa lembaga lokal utama yang bekerjasama dengan kami yaitu Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak), Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK). PTFI juga terlibat dalam sebuah Forum komunikasi tripartit antara perwakilan masyarakat Amungme, Kamoro dan PTFI yang dinamakan Forum MoU. Salah satu bentuk kerjasama ini berupa forum komunikasi rutin, pendampingan dan dukungan operasional lembaga.

LPMK merupakan lembaga mitra kami yang mengelola Dana Kemitraan dari PTFI. Sejak awal LPMK



Sosialisasi keamanan dan keselamatan dilakukan untuk mengurangi risiko kegiatan pendulangan tanpa ijin.

beroperasi, kami melakukan pendampingan dalam pengelolaan Dana Kemitraan agar tercapai target akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Pada tahun 2018, PTFI memberikan kontribusi Dana Kemitraan sebesar US\$ 60.2 juta (58 persen dari total Investasi Sosial). Sejak awal program Dana Kemitraan pada tahun 1996, total Dana Kemitraan dari PTFI yang dikelola LPMak sebesar US\$ 798 juta. Program LPMak dikelola secara kolaboratif oleh perwakilan Suku Amungme dan Kamoro, Pemerintah Mimika, Gereja, dan PTFI yang duduk di Badan Musyawarah dan Badan Pengurus. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur serta kegiatan agama, adat dan budaya di Kabupaten Mimika.

Pada tahun 2018, PTFI bersama LPMak mengadakan serangkaian lokakarya dan diskusi untuk rencana perubahan badan hukum LPMak. Rencana perubahan badan hukum ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi LPMak dalam pengelolaan Dana Kemitraan serta mencapai kemandirian lembaga di masa depan. LPMak juga bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyusunan rencana strategi lembaga dan rencana-strategi masing-masing biro. Rencana strategis ini akan menjadi acuan LPMak dalam menjalankan program-program lembaga tahun 2018 - 2023.

PTFI juga meneruskan pengembangan kapasitas dan bantuan pendanaan kepada lembaga-lembaga adat (Lemasa dan Lemasko) dan yayasan lokal (Yahamak). PTFI mendampingi lembaga dan yayasan tersebut dalam penyusunan program serta pengelolaan anggaran agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat adat. Berbagai pelatihan juga dilakukan untuk mendorong agar lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya secara lebih baik. Pada tahun ini, kami memfasilitasi Forum MoU untuk melihat kondisi terkini kegiatan pertambangan di PTFI. Kunjungan ini merupakan salah satu usaha membangun pemahaman yang sama tentang perubahan operasi yang terjadi di perusahaan dan kemungkinan dampaknya bagi masyarakat, termasuk dampak kontribusi dalam program investasi sosial. Kami berusaha membangun keterbukaan terhadap lembaga-lembaga lokal agar terbangun kepercayaan antara masyarakat dan perusahaan. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi mitra bagi perusahaan dan berkontribusi bagi pengembangan masyarakat. Kami percaya bahwa kepercayaan dari masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan kegiatan pertambangan dan program-program investasi sosial kami.



Forum MoU has been a tripartite channel for communication among PTFI, Lemasa, and Lemasko

PROGRAM KELEMBAGAAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME & KAMORO

Pengeluaran LPMK 2018

(Dalam Miliar Rupiah) berdasarkan program



Kontribusi Dana dari PTFI

Berbasis Akrual (Dalam Juta US\$)



Total Karyawan LPMK

(Berdasarkan Suku)



Total Dana (1996-2018)

US\$ 798 JUTA (RP 7,4 T)



Total Dana 2018

US\$ 60,1 JUTA (RP 591,4M)

LEMASA

KONTRIBUSI
PT FI & LPMK

Total Tahun 2000-2018

US\$ 18,6 JUTA

(Rp. 191,3 Miliar)

Total Dana Tahun 2018

US\$ 1,05 JUTA

(Rp. 15,2 Miliar)

LEMASKO

KONTRIBUSI
PT FI & LPMK

Total Tahun 2000-2018

US\$ 17 JUTA

(Rp. 174,9 Miliar)

Total Dana Tahun 2018

US\$ 1,05 JUTA

(Rp. 15,2 Miliar)

YAYASAN WAARTSING

KONTRIBUSI
PT FI KE WAARTSING

Total Tahun 2001-2018

US\$ 28,9 JUTA

(Rp. 289,7 Miliar)

Total Dana Tahun 2018

US\$ 500 RIBU

(Rp. 7,25 Miliar)

YAYASAN YU AMAKO

KONTRIBUSI
PTFI KE YU AMAKO

Total Tahun 2001-2018

US\$ 27,9 JUTA

(Rp. 279,3 Miliar)

Total Dana Tahun 2018

US\$ 500 RIBU

(Rp. 72,5 Miliar)

YAHAMAK

KONTRIBUSI
PTFI & LPMK

Total Tahun 2001-2018

US\$ 18,6 JUTA

(Rp. 191,3 Miliar)

Total Dana Tahun 2018

US\$ 273,4 RIBU

(Rp. 3,9 Miliar)

FORUM MOU 2000

KONTRIBUSI
PTFI & LPMK

Total Tahun 2005-2018

US\$ 2,0 JUTA

(Rp. 21,1 Miliar)

Total Dana Tahun 2018

US\$ 131,5 RIBU

(Rp. 1,9 Miliar)

BUDAYA

PT Freeport Indonesia menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan kearifan lokal dan melestarikan budaya masyarakat di sekitar area operasi perusahaan. Di lain pihak, tingginya angka migrasi di Mimika, baik dari dalam maupun luar wilayah Papua telah memberikan dampak pada segi sosial ekonomi maupun budaya lokal. Budaya, sistem ekonomi maupun teknologi modern dapat mengubah cara pandang masyarakat lokal terhadap budaya asli mereka. Kami turut memperhatikan pentingnya budaya lokal sebagai identitas asli Papua sehingga budaya tersebut tidak hilang begitu saja oleh arus modernisasi. Oleh karena itu, kami mengambil bagian dalam usaha pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat asli agar ciri khas dan khazanah budaya suku asli tetap terpelihara. Berbagai kegiatan promosi budaya dilakukan agar masyarakat lokal khususnya kaum muda dapat tetap memahami budayanya meskipun hidup dan tinggal serta bersinggungan dengan berbagai macam budaya dari luar.

Pada tahun 2018, kami melanjutkan komitmen dalam pelestarian budaya melalui kegiatan promosi budaya Suku Kamoro. Promosi tersebut kami lakukan melalui pameran produk seni dan tarian dan penjualan produk seni seperti ukiran dan anyaman serta tur budaya ke beberapa kampung pesisir bagi para tamu.



Mengenalkan budaya menganyam Suku Kamoro kepada anak-anak untuk meningkatkan penghargaan terhadap budaya lokal sejak dini.



Tarian Suku Kamoro yang menceritakan sejarah leluhur dan kehidupan sehari-hari selalu menjadi daya tarik bagi banyak pihak.

Pengembangan budaya Kamoro yang dilakukan meliputi kegiatan seleksi, pengumpulan serta penjualan hasil-hasil ukiran masyarakat Suku Kamoro untuk dapat dipromosikan melalui pameran dan di galeri di Kota Timika. Keuntungan dari penjualan ukiran tersebut diberikan seluruhnya kepada para pengukir. Pada tahun 2018, sebanyak 210 ukiran Kamoro pilihan yang berasal dari 135 pengukir/penganyam dari 19 kampung di empat distrik berhasil terjual. Lomba mengukir juga diadakan bagi para pemuda Kamoro sebagai bagian dari usaha pelestarian budaya. Munculnya pengukir muda Kamoro akan turut melestarikan budayanya.



Koperasi Wanita memproduksi tas tradisional "Noken" dengan dukungan peralatan sederhana..

HAK ASASI MANUSIA

Freeport Indonesia (PTFI) telah beroperasi di Papua, Indonesia sejak tahun 1973 dan menerapkan Prinsip Sukarela Tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) sejak tahun 2000. Kami melakukan berbagai langkah untuk menerima, mendokumentasikan, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM serta memberikan pelatihan dan promosi penegakan HAM kepada karyawan dan masyarakat. Kami menghormati hak setiap individu termasuk karyawan, masyarakat, mitra, dan siapapun yang mungkin terdampak dari operasi kami.

Pada tahun 2018, kami menerima 20 keluhan dugaan terkait HAM yang meliputi isu rumah tangga ketenagakerjaan, pelecehan verbal, diskriminasi dan intimidasi. Untuk dugaan terkait kasus rumah tangga, kami meneruskan kerjasama dengan Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak), yang merupakan lembaga lokal yang bergerak di bidang penegakan hak anak dan wanita. Sistem pengaduan hak asasi manusia dikomunikasikan dan diketahui oleh karyawan, keluarga, dan setiap orang dalam wilayah proyek. Semua kasus yang dilaporkan kami dokumentasikan, analisa dan selesaikan, atau dalam proses ditindaklanjuti oleh Kantor HAM PTFI.

Serangkaian insiden keamanan masih terjadi di wilayah operasi perusahaan, terutama di dataran tinggi. Kejadian ini diklaim dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata dan mengakibatkan adanya korban luka dan meninggal. Keselamatan tenaga kerja kami menjadi prioritas. Oleh karena itu, kami terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah keamanan di dalam wilayah operasi PTFI dan sekitarnya. Kami juga membatasi penggunaan jalan menuju operasi penambangan, termasuk penggunaan kendaraan lapis baja untuk transportasi karyawan di area tertentu.

Kami terus terlibat dengan sejumlah pemangku kepentingan di tingkat nasional dan lokal dalam



Peringatan Hari HAM Sedunia melibatkan para pelajar di Kabuapten Mimika

pelaksanaan Prinsip Sukarela dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pada tahun 2018, Kantor HAM PTFI mengadakan pertemuan dengan LSM tingkat nasional yang bergerak dalam bidang HAM seperti *Indonesia Center for Ethics (ICE)* untuk berkonsultasi tentang penerapan Prinsip Sukarela HAM dan insiden keamanan di PTFI. Kami juga bertemu dengan Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) di Jakarta untuk membahas risiko-risiko terkait HAM dan isu-isu tenaga kerja di PTFI. Kami juga melibatkan masyarakat, organisasi mitra, dan pihak berwenang setempat dengan melakukan sosialisasi program hak asasi manusia PTFI dan penerapan Prinsip Sukarela HAM

Pada tahun 2018, sekitar 560 karyawan PTFI, 5.000 karyawan kontraktor, 2.000 masyarakat lokal, organisasi mitra, pelajar dan mahasiswa mendapatkan pelatihan HAM. Kantor HAM PTFI memberikan pelatihan HAM dan Prinsip Sukarela bagi 1.072 anggota polisi dan militer. PTFI juga mewajibkan semua karyawan baru untuk mengikuti pelatihan HAM. PTFI juga meluncurkan program Duta HAM di mana perwakilan dari tujuh perusahaan kontraktor dilatih untuk mempromosikan kesadaran dan kebijakan HAM PTFI dan memberikan pelatihan HAM untuk tenaga kerja perusahaan mereka.

TATA KELOLA PROGRAM INVESTASI SOSIAL

Program-program investasi sosial PT Freeport Indonesia (PTFI) dikelola oleh berbagai divisi di PTFI. Pengelolaan program ini mengikuti prosedur operasi standar tentang dari investasi sosial dari perusahaan induk kami. Divisi-divisi tersebut meliputi Community Affairs, Special Project, Komite Kontribusi dan Institut Pertambangan Nemangkawi. Selain itu, program investasi sosial juga dijalankan oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAM) yang mengelola Dana Kemitraan dari PTFI. Seluruh pihak yang tersebut menjalankan berbagai program yang telah direncanakan dan disetujui untuk pengembangan masyarakat dalam berbagai bidang.

Pada tahun 2018, PTFI akan memasuki tahap peralihan dari operasi tambang terbuka ke tambang bawah tanah. Pada masa peralihan ini, perusahaan melakukan langkah-langkah penyesuaian biaya untuk mencapai efisiensi di berbagai bidang. Namun demikian, kami terus menjaga komitmen kami untuk terus berkontribusi dalam program-program investasi sosial. Pada tahun 2018, nilai investasi sosial kami sebesar US\$ 102,9 juta. Investasi tersebut delapan



PT Freeport Indonesia meraih penghargaan dalam TOP CSR Award 2018

persen lebih besar dari investasi sosial kami tahun 2017. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam memberikan manfaat terbaik dari kehadiran kami bagi masyarakat sekitar.

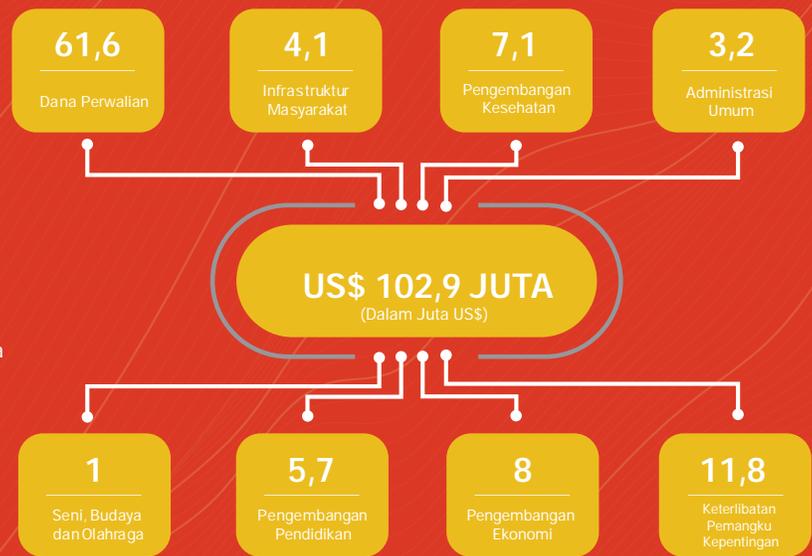
Divisi Community Affairs menjadi bagian dari perusahaan untuk memastikan komitmen sosial





Total Investasi Sosial PTFI Tahun 2018

Investasi sosial yang dikelola Divisi CA dan melalui Dana Kemitraan sebesar 87 persen, sedangkan sisanya dikelola oleh divisi lain di PTFI (Institut Pertambangan Nemangkawi, Special Projects, dan Komite Kontribusi).



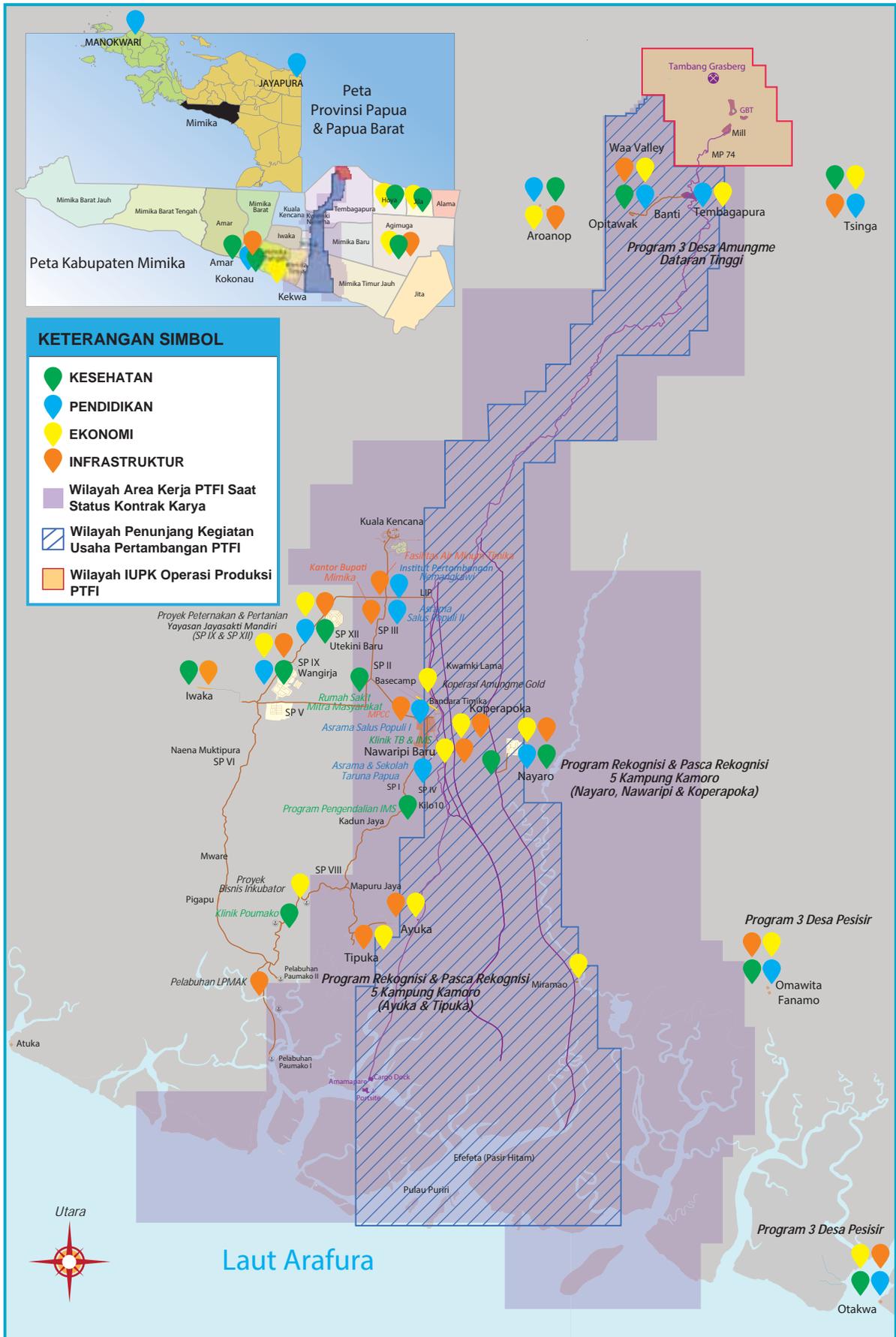
PTFI bagi masyarakat dapat terpenuhi. Program-program investasi sosial kami rencanakan dan koordinasikan bersama dengan seluruh unit di Divisi CA maupun dengan departemen lain di PTFI. Kami terus meningkatkan penggunaan kerangka berbasis risiko untuk mengelola risiko-risiko bisnis utama, mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko serta kesempatan sosial yang berdampak pada keberlanjutan operasi perusahaan dan mengurangi risiko bagi masyarakat sekitar. Kami selalu berusaha agar program-program yang kami lakukan sesuai dengan standar dan praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan program investasi sosial.

Dalam melakukan komitmen investasi sosial, kami mengikuti dan menyelaraskan dengan peraturan dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai bentuk kepatuhan dan kontribusi dalam rencana pembangunan nasional. Pada tahun 2018, Pemerintah RI menerbitkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) oleh perusahaan tambang. Kami bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pemetaan sosial dan penilaian kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Hasil pemetaan sosial dan penilaian kebutuhan masyarakat ini selanjutnya digunakan untuk menyusun rencana induk

program PPM sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 25 Tahun 2018 dan Keputusan menteri ESDM nomor 1824 Tahun 2018. Pemetaan sosial dan penilaian kebutuhan masyarakat ini melibatkan masyarakat di sekitar tambang, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lokal lainnya. Kami terlibat dalam serangkaian lokakarya bersama Pemerintah Provinsi Papua terkait rencana pembangunan Papua. Seluruh usaha penyalarsan ini kami lakukan agar program investasi sosial kami selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan disaat yang sama sejalan dengan program pembangunan nasional dan daerah.

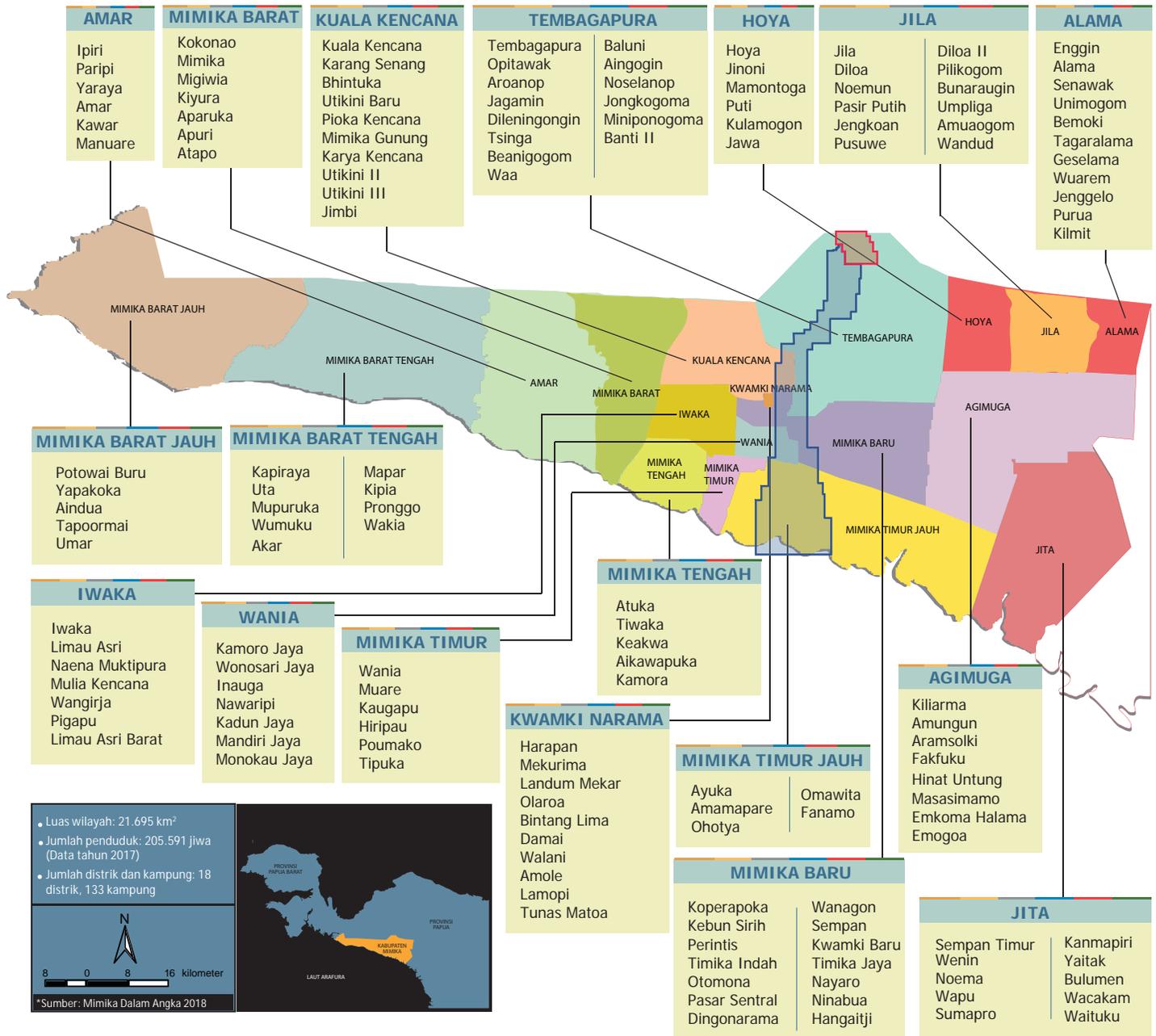
Kami mematuhi standar-standar keselamatan yang ditetapkan oleh perusahaan serta standar keselamatan nasional dan internasional dalam melaksanakan kegiatan investasi sosial kami. Pada tahun 2018, kami berhasil mencapai tingkat Kinerja Akuntabilitas Keselamatan sebesar 99 persen yang melebihi target perusahaan sebesar 95 persen. Untuk memastikan setiap karyawan mematuhi standar keselamatan, para karyawan Divisi CA mengikuti berbagai pelatihan keselamatan kerja seperti, pemadaman kebakaran, investigasi insiden, alat pelindung diri, dan pencegahan fatalitas.

Lampiran 1: Peta Program Pengembangan Masyarakat oleh PTFI



Lampiran 2: Peta Distrik Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik dengan 133 kampung atau desa dan memiliki luas wilayah sebesar 21.522 km² (4,75 persen dari luas wilayah Provinsi Papua). Berdasarkan data tahun 2016, populasi penduduk di Kabupaten Mimika sebesar 201.677 jiwa.



Plaza 89, Lt. 5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6
Jakarta 12940, Indonesia
+62 21 2591818
+62 21 2591945 (Faks.)

www.fcx.com

Office Building 1
Jl. Mandala Raya Selatan No. 1
Kuala Kencana, Timika 99920, Papua - Indonesia
+62 901 432005
+62 901 432209 (Faks.)

www.ptfi.co.id